PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **494878**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 1.640.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/196 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, Rp. 340.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 221.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX ABS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 6.500.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 1.157.066.697**

F. HARTA LAINNYA — **Rp. ----**

Sub Total	**Rp.**	**3.024.566.697**
III. HUTANG	**Rp.**	**40.000.000**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**2.984.566.697**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.